

LAPORAN

AMNESTY

INTERNATIONAL

2021/22

KONDISI HAK ASASI MANUSIA DUNIA



AMNESTY
INTERNATIONAL



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	II
ANALISIS GLOBAL : TIGA TREN UTAMA	6
KESEHATAN DAN KETIDAKSETARAAN	6
RUANG SIPIL	8
PENOLAKAN NEGARA-NEGARA BELAHAN UTARA – PENGUNGSI DAN IMIGRAN	9
REKOMENDASI	11
RINGKASAN KAWASAN ASIA – PASIFIK	12
REPRESI TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT	12
KEBEBASAN BEREKSPRESI	13
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL	14
PEMBELA HAK ASASI MANUSIA	15
HAK ATAS KESEHATAN	15
HAK-HAK PEKERJA	16
HAK-HAK PENGUNGSI DAN MIGRAN	16
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN	17
HAK-HAK LGBTI	18
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT	18
KEJAHATAN DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL	19
PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA	19
IMPUNITAS	19
REKOMENDASI	20
INDONESIA	22
LATAR BELAKANG	22
PEMBELA HAK ASASI MANUSIA	22
HAK MASYARAKAT ADAT	22
KEBEBASAN BEREKSPRESI	23
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL	23
PENGUNAAN KEKUATAN BERLEBIHAN	24
PEMBUNUHAN DILUAR HUKUM	24
HAK PEKERJA	24
KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN	25

PENDAHULUAN

Bagaimana nasib masyarakat di bawah politik kekuasaan tahun 2021? Apakah hak asasi ditegakkan dengan lebih baik di tengah persaingan sengit dunia akan keuntungan, keistimewaan, dan posisi? Apakah pemilik hak lebih diakui, dihormati, dan dilindungi ketika pandemi Covid berlanjut dan konflik-konflik memburuk?

Pada tahun 2021, slogan-slogan apik menjadi mantra: “kita akan membangun kembali dengan lebih baik”. Janji-janji juga dilontarkan: janji-janji “pengaturan ulang global” atas perekonomian; atas “agenda bersama” global untuk mengawasi penyalahgunaan korporasi, atas pemulihan yang berkelanjutan dan hijau, atas solidaritas global transformasional. Tetapi slogan-slogan yang terealisasi tak banyak memberi arti, janji-janji tidak ditepati dan lebih banyak orang di lebih banyak tempat yang mengalami kegagalan.

Dihadapkan dengan pilihan lain, pemerintah masih memilih kebijakan dan menempuh jalan yang menjauhkan kita dari martabat dan hak asasi. Ketimpangan sistemik yang mendorong pandemi, justru semakin mengakar, tidak berkurang secara sistematis. Arus layanan dan pasokan kesehatan lintas batas yang dapat memperluas akses ke perawatan seringkali tidak terjadi. Kerjasama antar pemerintah yang diperlukan untuk mencegah bencana lebih lanjut dan mengurangi krisis hak asasi manusia jarang terwujud.

Setahun yang lalu, saat menulis kata pengantar pertama saya untuk laporan tahunan Amnesty, saya sangat berharap bahwa tahun 2021 akan membuat negara-negara dan masyarakat melakukan perjalanan lebih jauh menuju pemulihan Covid-19 yang inklusif. Dengan terobosan ilmiah, dilakukan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menempatkan akhir pandemi dalam jangkauan kita, tampaknya mungkin. Namun, apa yang salah?

Alih-alih memberi kita tatanan global yang nyata dan bermakna, para pemimpin dunia justru terjebak ke dalam kepentingan nasional mereka. Alih-alih memberikan keamanan yang lebih besar kepada lebih banyak orang, para pemimpin mendorong kita lebih dekat ke jurang ketidakamanan dan, terkadang, perang. Alih-alih membasmi praktik dan strategi yang memecah belah, para pemimpin justru menyeret kita ke dalam kontestasi pencarian kekayaan dan sumber daya, dan konflik. Alih-alih menjunjung tinggi norma hak asasi manusia universal tentang kesetaraan, justru rasisme menjadi lebih tertanam dalam kerja sistem internasional, bahkan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang tidak – menambah sejarah kelam tentang hidup siapa yang penting dan siapa yang tidak.

Tahun 2021 seharusnya menjadi tahun penyembuhan dan pemulihan. Sebaliknya, **justru menjadi inkubator ketidaksetaraan dan ketidakstabilan yang lebih besar**, tidak hanya pada tahun 2021, tidak hanya untuk 2022, tetapi untuk dekade mendatang.

Gelombang infeksi, penyakit, dan kematian Covid-19 yang sangat besar pada tahun 2021 sangat dapat diprediksi dan sangat dapat dihindari. Di saat negara kaya berbangga atas peluncuran vaksin mereka, di akhir tahun, nasionalisme vaksin yang mereka gembarkan telah membuat lebih dari separuh warga dunia tidak tervaksinasi atau hanya tervaksinasi sebagian. Tingkat imunisasi yang rendah memungkinkan varian baru untuk berkembang, menempatkan kita semua pada risiko mutasi yang resistan terhadap vaksin dan memperpanjang pandemi. Vaksin booster dikirim untuk orang-orang di negara kaya, sementara jutaan lainnya di belahan dunia Selatan, termasuk mereka yang paling berisiko terkena penyakit serius atau kematian,

masih menunggu vaksin pertama mereka. Pada bulan September, Amnesty International menemukan bahwa negara-negara maju menyimpan surplus setengah miliar dosis, cukup untuk memvaksin sepenuhnya beberapa negara yang paling rendah tingkat vaksinasinya. Pembuangan surplus dosis yang dibiarkan kedaluwarsa adalah gejala mengejutkan dari dunia tanpa kompas moral; dunia yang kehilangan arah. Sementara CEO dan investor perusahaan mengantongi keuntungan besar, mereka yang sangat membutuhkan vaksin disuruh menunggu. Dan mati.

Di tengah pandemi Covid-19, konflik-konflik baru bermunculan, dan konflik-konflik yang belum terselesaikan semakin parah. Di Myanmar, Ethiopia, Israel/Palestina, Afganistan, Yaman, Libya, Burkina Faso di antaranya, konflik menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional dalam skala besar. Hanya dalam beberapa contoh, respons internasional yang dibutuhkan datang; namun keadilan dan akuntabilitas yang muncul sangat sedikit jumlahnya. Sebaliknya, konflik meluas. Bertambah lama dari waktu ke waktu, dampaknya memburuk. Jumlah dan keragaman pihak yang mengintervensi meningkat. Teater konflik baru dibuka. Senjata baru diuji. Lebih banyak kematian dan cedera terjadi. Nyawa menjadi tidak berarti.

Tidak ada tempat lain yang menunjukkan kehancuran tatanan dunia selain di Afghanistan di mana, setelah penarikan semua pasukan internasional, runtuhnya pemerintah, dan pengambilalihan negara oleh Taliban, perempuan dan laki-laki Afghanistan yang berjuang untuk hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dibiarkan berjuang sendiri.

Sementara itu, kegagalan global untuk membangun respons global terhadap pandemi menabur benih konflik dan ketidakadilan yang lebih besar. Meningkatnya kemiskinan, kerawanan pangan, dan instrumentalisasi pandemi oleh pemerintah untuk menekan perbedaan pendapat dan protes – semuanya ditanam pada tahun 2021, disiram dengan nasionalisme vaksin dan dipupuk oleh keserakahan negara-negara kaya.

Warisan tahun 2021 seperti itu juga terlihat pada konferensi iklim COP26. Digerogoti oleh rencana jangka pendek dan digagalkan oleh keegoisan, dua minggu negosiasi itu berakhir dengan pengkhianatan. Pemerintah mengkhianati rakyat mereka dengan gagal menyepakati kesepakatan untuk mencegah pemanasan yang dahsyat. Dengan adanya hal itu, sebagian besar umat manusia di masa depan akan terancam dengan kelangkaan air, gelombang panas, banjir, dan kelaparan. Pemerintah yang mengusir para imigran di perbatasan mereka menghukum jutaan orang untuk meninggalkan rumah mereka demi mencari keamanan dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Negara-negara yang sudah terjerumus dalam tingkat utang yang tidak berkelanjutan dibiarkan tanpa pendanaan iklim yang cukup untuk mengatasi perubahan lingkungan yang mematikan.

Tahun 2021 menetasakan penerimaan lebih lanjut akan kebijakan dan ideologi rasis yang praktiknya memaksa jutaan orang untuk hidup dalam bahaya. Kami melihat bahwa produsen vaksin dengan tegas menolak untuk berbagi pengetahuan dan teknologi mereka dengan negara-negara berpenghasilan rendah, mencegah perluasan manufaktur yang diperlukan untuk menutup kesenjangan. Kami melihat hal itu di banyak penolakan pemerintah kaya untuk mendukung inisiatif global, seperti usulan pengabaian TRIPS (hak intelektual) yang dapat meningkatkan produksi vaksin. Kami melihat hal itu dalam kebijakan pemerintah yang didasarkan pada “risiko kematian” sebagai pencegah yang dapat diterima untuk rekor jumlah pengungsi, imigran, pengungsi internal dan pencari suaka; kebijakan yang melangkah lebih jauh hingga

mengkriminalisasi mereka yang mencoba menyelamatkan nyawa. Kami melihat hal itu lagi dan lagi di dalam kebangkitan wacana politik publik yang memojokkan minoritas, melemparkan ide-ide kebebasan yang sewenang-wenang (termasuk "kebebasan untuk membenci") ke dalam upaya melawan hak, norma, dan standar universal yang dibuat untuk melindungi kita dari rasisme dan seksisme. Kami melihat hal itu di dalam pencabutan layanan penting untuk kesehatan seksual dan reproduksi dengan konsekuensi yang memprihatinkan bagi perempuan dan anak perempuan pada khususnya.

Jika pada tahun 2021, mereka yang berkuasa tidak memiliki ambisi dan imajinasi untuk mengatasi musuh terberat umat manusia, hal yang sama tidak dapat disampaikan kepada orang-orang yang seharusnya mereka wakili. Pada tahun 2021, orang-orang di seluruh dunia berjuang tidak hanya untuk hak mereka sendiri tetapi demi solidaritas untuk hak semua orang. Mereka menuntut institusi yang lebih baik, hukum yang adil dan masyarakat yang lebih adil. Komite Nobel mengakui adanya contoh pemberani dari dedikasi dan visi tersebut ketika mereka memberikan hadiah Nobel perdamaian 2021 kepada dua jurnalis – Maria Ressa dari Filipina dan Dmitry Muratov dari Rusia – atas sikap berani mereka melawan kepemimpinan yang korup dan pembatasan pers di negara masing-masing.

Orang-orang di seluruh dunia bangkit, bahkan dalam menghadapi penindasan kejam rezim; pemerintah yang terkadang menggunakan pandemi sebagai tabir untuk menolak hak untuk memprotes. Pada tahun 2021, setidaknya 67 negara memperkenalkan undang-undang baru untuk membatasi kebebasan berekspresi, berserikat, atau berkumpul.

Namun orang-orang di seluruh dunia tak gentar membuat suara mereka didengar. Di lebih dari 80 negara, mereka bangkit untuk memprotes dalam jumlah besar. Di Rusia, aksi unjuk rasa untuk mendukung pemimpin oposisi Aleksei Navalny berlangsung meski ada sejumlah penangkapan dan penuntutan sewenang-wenang massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petani di India berdemonstrasi menentang tiga undang-undang pertanian yang kontroversial hingga Desember ketika pemerintah federal India tunduk pada kekuatan rakyat dan mencabut undang-undang tersebut. Sepanjang tahun 2021, makin banyak orang melawan. Di Sudan, Kolombia, Myanmar, Thailand, Lebanon, Venezuela, dan di lebih banyak negara.

Di seluruh dunia, pada tahun 2021, pengacara, akademisi, LSM, korban dan keluarga mereka mengejar keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tanpa lelah. Beberapa keputusan penting dimenangkan. Pada bulan Februari, dua anak Vietnam yang pemberani, dengan dukungan seorang profesor hukum yang berbasis di London, memenangkan kasus mereka di Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa melawan kriminalisasi Inggris terhadap korban perdagangan manusia. Pada bulan Juni, Alieu Kosiah, mantan komandan kelompok pemberontak di Liberia, dinyatakan bersalah di Swiss atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Litigasi strategis yang inovatif dan pengaduan pidana diajukan oleh LSM terhadap perusahaan multinasional besar termasuk Nike, Patagonia, dan C&A atas keterlibatan mereka dalam kerja paksa di wilayah Xinjiang, Cina.

Pada tahun 2021 masyarakat sipil dan jurnalis juga menghadapi Big Tech. Proyek Pegasus – sebuah upaya kolaboratif besar antara pakar hak asasi manusia dan jurnalisme investigatif – mengungkap pengawasan negara terhadap kritikus pemerintah dan pembela hak asasi manusia, menyoroti taktik yang digunakan untuk menghancurkan perbedaan pendapat. Pada bulan November, pengadilan AS

mengizinkan WhatsApp untuk melanjutkan kasusnya terhadap kelompok NSO, pencipta spyware Pegasus, yang menandai momen penting untuk pengungkapan informasi di pengadilan. Tahun ini juga menjadi saksi denda terbesar terhadap perusahaan teknologi terkemuka karena pelanggaran perlindungan data dan undang-undang privasi, termasuk Amazon (denda € 746 juta), WhatsApp (€ 225 juta) dan Grindr (€ 6,34 juta).

LSM, yang didukung oleh rakyat biasa, juga ikut mendorong perkembangan positif dalam norma dan mekanisme internasional. Organisasi masyarakat sipil, termasuk Amnesty International, berhasil melobi Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan dan mengusulkan dibentuknya Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia dan perubahan iklim, dan hak asasi manusia di Afghanistan.

Jika pemerintah tidak membangun kembali dengan lebih baik, maka kita hanya punya sedikit pilihan. Kita harus meneliti setiap keputusan dan melawan setiap upaya untuk memberangus suara kita. Tapi kita juga harus melangkah maju bersama satu sama lain. Kita harus bersama-sama membangun gerakan yang lebih nyata, menuntut, dan mendesak untuk solidaritas global – dari orang ke orang. Jika pemimpin kita tidak akan membawa kita pada (pemenuhan) hak, maka hak (asasi) harus menuntun kita satu sama lain.

Untuk itu kita harus mengorganisir, mendukung dan memungkinkan gerakan global untuk keadilan. Kita tahu bahwa pada akhirnya masa depan dan nasib kita saling terkait dan saling bergantung – manusia ke planet (bumi). Kita tahu itu. Kita harus menjalaninya. Kita perlu mengambil alih – hak asasi manusia menuntut dan menuntut bersama-sama tata kelola global untuk hak-hak kita masing-masing, dengan tidak mengecualikan satu pun dari kita, demi kepentingan kita semua. Sekarang, mari bersama – kita semua – menetaskan itu.

Agnès Callamard

Sekretaris Jenderal

ANALISIS GLOBAL : TIGA TREN UTAMA

Tahun 2021 adalah tahun harapan dan janji: harapan semua orang bahwa vaksin akan menghentikan kehancuran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan janji oleh pemerintah dan kelompok seperti G7 dan G20 untuk “membangun kembali dengan lebih baik”. Namun, ini seringkali hanya basa-basi, dengan beberapa pemerintahan bahkan menggandakan eksploitasi terhadap pandemi untuk memperkuat posisi mereka sendiri.

Analisis ini mengeksplorasi tiga tren utama yang muncul dari penelitian hak asasi manusia oleh Amnesty International tahun 2021 di 154 negara: kesehatan dan ketidaksetaraan, ruang sipil, dan dorongan balik yang dilakukan negara-negara belahan Utara (*Global-North*) terhadap pengungsi dan migran.

KESEHATAN DAN KETIDAKSETARAAN

Vaksin memberikan harapan untuk berakhirnya pandemi, yang menurut WHO telah merenggut setidaknya 5,5 juta nyawa pada akhir 2021, meskipun adanya juga perkiraan menunjukkan jumlah kematian sebenarnya bisa dua hingga tiga kali lebih tinggi. Banyak pemerintah berjanji untuk mendukung cakupan vaksinasi global, dan G7 dan G20 membuat komitmen penting. Namun, terlepas dari upaya beberapa pemerintah di belahan dunia selatan (*Global-South*) khususnya, kerja sama internasional sebagian besar gagal. Negara-negara berpenghasilan tinggi menimbun jutaan dosis lebih banyak daripada yang mereka gunakan, membuat mereka dapat memvaksinasi seluruh populasi mereka tiga hingga lima kali lipat. Pada bulan September, beberapa negara ini diperkirakan masih memiliki (stok) lebih dari 500 juta dosis vaksin. Sementara Uni Eropa memiliki tingkat vaksinasi lebih dari 70%, banyak negara di Selatan masih menunggu akses ke suntikan pertama. Pada akhir tahun, kurang dari 8% dari 1,2 miliar orang Afrika telah divaksinasi lengkap, tingkat vaksinasi terendah di benua mana pun di dunia dan jauh dari target vaksinasi WHO 40% pada akhir tahun 2021. Ketidaksetaraan vaksin semakin mengakibatkan ketidakadilan rasial.

Negara-negara kaya seperti negara-negara anggota Uni Eropa, Norwegia, Swiss, dan Inggris juga secara sistematis memblokir upaya untuk meningkatkan produksi vaksin global, yang sebetulnya akan meningkatkan akses negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mendapatkan vaksin, dengan menolak untuk mendukung pengabaian sementara kekayaan atas hak intelektual. Sementara itu, perusahaan farmasi, yang didukung oleh pemerintah yang kuat, sangat memprioritaskan pengiriman vaksin ke negara-negara berpenghasilan tinggi. Perusahaan-perusahaan utama yang memimpin produksi vaksin Covid-19 memonopoli kekayaan intelektual dan memblokir transfer teknologi, melobi secara agresif terhadap langkah-langkah yang akan memperluas produksi global vaksin-vaksin ini. Ini terlepas dari fakta bahwa sebagian besar perusahaan menerima miliaran dolar dalam pendanaan publik, dan menghasilkan keuntungan yang mengejutkan dari pandemi. Tiga (Perusahaan) – BioNTech, Pfizer dan Moderna – ditargetkan menghasilkan keuntungan US\$130 miliar pada akhir tahun 2022.

Program vaksinasi nasional menyajikan gambaran yang beragam. Beberapa layanan kesehatan nasional berhasil menyelenggarakan program vaksinasi nasional berkat pendekatan ilmiah, kampanye informasi dan tenaga kesehatan yang berdedikasi. Namun, program vaksinasi nasional lainnya ditandai dengan kurangnya transparansi dan konsultasi, dan dipengaruhi oleh korupsi. Program lain tidak memprioritaskan atau bahkan mengecualikan banyak orang yang sangat rentan, termasuk imigran dan pengungsi, pengungsi internal, masyarakat pedesaan dan masyarakat adat, tahanan, tunawisma dan orang-orang tidak berdokumen lainnya, bersama dengan kelompok lain yang menghadapi diskriminasi secara historis. Di Rusia, vaksinasi bagi para tunawisma dan imigran tak terdaftar diperumit oleh persyaratan dokumen identitas dan asuransi kesehatan, yang seringkali

tidak dimiliki kelompok-kelompok itu. Di Nikaragua, beberapa laporan media menunjukkan adanya pilih kasih dalam upaya untuk memvaksinasi pendukung pemerintah terlebih dahulu, terlepas dari profil risiko mereka terhadap Covid-19. Banyak negara, seperti di kawasan Amerika, juga gagal membuat protokol khusus untuk memastikan intervensi yang sesuai untuk masyarakat adat.

Lebih jauh lagi, pesan dan manipulasi yang tidak bermoral oleh mereka yang berusaha menyebarkan kebingungan untuk keuntungan diri sendiri, termasuk politisi dan bahkan para pemimpin, ditambah dengan perusahaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, memicu informasi yang tidak benar dan meningkatkan penolakan vaksin. Konflik dan krisis juga berdampak pada program vaksinasi, dan hak atas kesehatan secara umum; misalnya di Yaman dan Ethiopia dimana terjadi serangan terhadap infrastruktur sipil dan pembatasan akses kemanusiaan. Sama halnya dengan di Afghanistan dan Myanmar, gejolak politik mengakibatkan sistem perawatan kesehatan mereka yang sudah rapuh menuju ambang kehancuran.

Hak asasi atas kesehatan dan melalui kesehatan bisa dibilang tidak pernah lebih relevan atau berisiko seperti sekarang. Ada peluang untuk menggunakan investasi global yang besar dan terobosan medis untuk meningkatkan pemberian layanan kesehatan. Namun, pemerintah di seluruh dunia gagal menunjukkan kepemimpinannya. Mereka gagal mengubah pengabaian dan kekurangan dana yang meluas selama beberapa dekade atau untuk mengatasi akses yang terbatas dan tidak setara dalam perawatan kesehatan. Keduanya adalah alasan utama skala krisis yang dihadapi sistem kesehatan saat ini yang menghadapi tantangan ganda dalam penanganan Covid-19 dan dalam menyediakan layanan kesehatan secara teratur. Kegagalan tersebut dirasakan khususnya oleh ras minoritas, pekerja migran dan orang tua, serta perempuan yang membutuhkan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi. Beberapa pihak berwenang memperburuk situasi dengan tindakan seperti menyangkal keberadaan kasus Covid-19, mengabaikan risiko atau melarang vaksin dari negara tertentu karena alasan politik. Di beberapa negara Afrika termasuk Kongo, Nigeria dan Togo, petugas kesehatan harus melakukan pemogokan atau protes untuk menuntut tindakan atas sistem kesehatan yang tidak berfungsi atau pembayaran tunggakan gaji selama berbulan-bulan. Di tempat lain, termasuk di Eropa, pemerintah melakukan restriksi terhadap petugas kesehatan yang bersuara tentang masalah pada layanan kesehatan.

Sementara itu, situasi pandemi dan respon terhadapnya terus memberikan dampak yang menghancurkan di banyak negara, atas hak-hak ekonomi dan sosial lainnya, menjebak ratusan juta orang dalam kemiskinan ekstrem. Peningkatan utang akibat pandemi berdampak negatif terhadap kemungkinan investasi penting dalam layanan sosial dasar, dan janji pemulihan ekonomi dirusak oleh pengurangan utang yang terbatas. Pengurangan utang sangat terbatas sebesar \$45 miliar yang disepakati oleh G20 pada April 2020, yang diperpanjang dua kali hingga akhir tahun 2021, hanya diterjemahkan menjadi bantuan aktual \$10,3 miliar ke lebih dari 40 negara yang memenuhi syarat. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa inisiatif itu hanya menghasilkan penangguhan pembayaran utang dan 46 negara yang mengajukan masih harus membayar utang sebesar \$36,4 miliar. Inisiatif itu juga gagal menangani masalah pelunasan utang kreditur swasta, di mana hanya 0,2% yang ditanggihkan.

Pada saat yang sama, 2021 memberi isyarat beberapa peluang yang dapat diambil pemerintah untuk meletakkan dasar bagi akuntabilitas perusahaan dan tanggapan efektif terhadap pandemi di masa depan, jika mereka menempatkan hak asasi manusia di jantung upaya ini. Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*) pada Desember 2021 setuju memulai proses global untuk merancang dan merundingkan instrumen internasional demi memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi, meskipun tidak ada referensi berarti tentang hak asasi manusia yang dimasukkan pada akhir tahun. Setiap perjanjian semacam itu hanya akan memiliki dampak terbatas, kecuali jika disertai dengan reformasi komprehensif hukum kesehatan global dan perubahan transformasional dalam cara kerja pemerintah di dalam lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, setelah beberapa dekade gagal mencapai konsensus apa pun, negara-negara G20 mencapai kesepakatan tentang beberapa reformasi sistem perpajakan global. Hal itu, meskipun

tidak cukup, merupakan langkah ke arah yang benar untuk mengatasi salah satu masalah global yang paling keras dan merusak--penghindaran pajak perusahaan dan penghindaran pajak yang agresif.

RUANG SIPIL

Alih-alih memberikan ruang untuk diskusi dan debat tentang cara terbaik untuk mengatasi tantangan tahun 2021, tren yang terus terjadi adalah pemerintah-pemerintah menekan suara-suara independen dan kritis, beberapa bahkan menggunakan pandemi sebagai dalih untuk semakin menyempitkan ruang sipil. Sepanjang tahun ini, banyak pemerintah menggandakan upaya untuk memaksakan dan/atau menerapkan tindakan represif untuk menargetkan pihak-pihak yang mengkritik mereka, dan banyak dari aksi itu dibingkai seolah-olah sebagai upaya mengekang penyebaran informasi yang salah tentang Covid-19. Di Cina, Iran, dan sekitarnya, pihak berwenang menangkap dan menuntut orang-orang yang mengkritik atau menentang cara mereka merespon Covid-19. Di seluruh dunia, negara-negara secara berlebihan mencegah dan membubarkan protes damai, terkadang menggunakan dalih peraturan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Beberapa pemerintah, terutama di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, memblokir atau sangat membatasi akses ke internet dan media sosial; di negara-negara seperti Eswatini dan Sudan Selatan, internet kadang diputus dalam upaya untuk menggagalkan aksi-aksi protes terencana. Serangan terhadap jurnalis, kritikus, dan pembela hak asasi manusia, termasuk mereka yang membela hak-hak perempuan dan individu LGBT, adalah bagian terbesar dari serangan balik terhadap kebebasan berekspresi ini.

Tren kemunduran tersebut merupakan persiapan dan pengenalan atas undang-undang baru yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai. Berdasarkan pemantauan Amnesty International, undang-undang seperti itu diperkenalkan sepanjang tahun ini di setidaknya 67 dari 154 negara yang tercakup dalam laporan ini, termasuk Kamboja, Mesir, Pakistan, Turki, dan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pembatasan yang diperkenalkan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mengatasi Covid-19 tetap dipertahankan bahkan ketika situasi kesehatan masyarakat telah berubah.

Pembela hak asasi manusia dan kritikus pemerintah tetap vokal dan tidak takut, meskipun mereka diserang oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan kuat dengan berbagai alat. Ini termasuk penahanan sewenang-wenang dan penuntutan yang tidak adil, tuntutan hukum yang mengintimidasi dan tidak berdasar, pembatasan administratif dan ancaman lainnya serta kekerasan, termasuk penghilangan paksa dan penyiksaan. Ada peningkatan penggunaan tuntutan hukum strategis terhadap partisipasi publik (SLAPPs) untuk menargetkan dan melecehkan pembela hak asasi manusia, termasuk di Amerika Serikat terhadap salah satu pengacara utama yang mewakili korban 'dumping' minyak di Ekuador dalam kasus simbolis melawan Chevron Corporation dan di Kosovo melawan aktivis yang mengangkat keprihatinan atas dampak lingkungan dari proyek pembangkit listrik tenaga air Kelkos Energy yang berbasis di Austria. Pemerintah Andorra juga mengajukan kasus pidana pencemaran nama baik terhadap seorang aktivis karena berbicara tentang hak-hak perempuan di forum pakar PBB. Para pembela hak asasi manusia ditahan secara sewenang-wenang di setidaknya 84 dari 154 negara yang dipantau oleh Amnesty International, termasuk 17 dari 19 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara-negara Amerika tetap menjadi salah satu wilayah paling berbahaya di dunia untuk memperjuangkan hak asasi manusia, dengan sejumlah pembela hak asasi manusia tewas di setidaknya delapan negara. Berbagai peristiwa di Myanmar dan Afghanistan memperlihatkan para pembela hak asasi manusia menghadapi kekerasan dan intimidasi yang lebih besar dari sebelumnya, ketika pencapaian hak asasi manusia dijunjkir-balik. Di beberapa negara, pemerintah mengambil langkah dramatis untuk menutup LSM dan/atau media, seperti di Rusia dan wilayah Hong Kong di Cina, dalam tindakan yang sebelumnya mungkin dianggap tidak terpikirkan. Di Afghanistan, lebih dari 200 outlet media ditutup di seluruh negeri setelah Taliban mengambil alih. Dalam serangan yang sangat mencolok,

Belarus menggunakan ancaman bom palsu untuk mengalihkan sebuah pesawat sipil sehingga bisa menangkap penumpang, yang adalah seorang jurnalis yang diasingkan. Kelompok marjinal yang berani mengklaim tempat mereka dalam kehidupan publik dan memimpin perjuangan hak asasi manusia menghadapi serangkaian risiko dan tantangan tertentu, mulai dari diskriminasi dan pengucilan, hingga serangan rasis dan berbasis gender, baik offline maupun online. Pemerintah juga semakin banyak menggunakan alat teknologi, termasuk spyware, untuk menargetkan jurnalis, pembela hak asasi manusia, lawan politik, dan suara kritis lainnya. Dalam kombinasi pembatasan akibat pandemi dan represi yang terus berlangsung, LSM di banyak negara, mulai dari India hingga Zimbabwe, menghadapi tantangan baru dalam menjalankan aktivitas atau mengakses pendanaan asing.

Serangan terhadap ruang sipil, komunitas minoritas, dan perbedaan pandangan juga didorong oleh aktor non-negara, terkadang bersenjata, terkadang memiliki keterkaitan dengan negara. Ini terbukti di India, di mana kaum Dalit, Adivasis, dan Muslim terus menghadapi pelecehan dan kejahatan kebencian yang meluas. Di Brasil, pembunuhan aktivis lingkungan oleh aktor non-negara terus berlanjut. Di Eropa, dalam konteks yang ditandai dengan meningkatnya rasisme, islamofobia, dan antisemitisme, komunitas minoritas seperti Muslim, Yahudi, dan lainnya sering menghadapi kejahatan kebencian yang meningkat, termasuk di Jerman, Inggris, Prancis, Austria, dan Italia.

Dalam menghadapi protes, tahun 2021 menyaksikan peningkatan tren bagi pemerintah dalam membatasi ruang sipil, mengkriminalisasi kumpulan-kumpulan damai, memiliterisasi kepolisian mereka, menggunakan kekuatan keamanan nasional dalam menghadapi gerakan protes, dan sebaliknya memperkenalkan peraturan untuk menindak demonstrasi. Tanggapan terhadap protes oleh pasukan keamanan sangat keras: Amnesty International mendokumentasikan penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan/atau berlebihan terhadap demonstran di setidaknya 85 dari 154 negara yang dipantau, di semua wilayah. Pasukan keamanan secara teratur menyalahgunakan senjata api dan senjata yang tidak terlalu mematikan, termasuk gas air mata dan peluru karet, membunuh ratusan orang di luar hukum dan melukai lebih banyak lagi. Di beberapa negara terdapat kecenderungan terus-menerus ke arah militerisasi respon negara terhadap protes, termasuk penggunaan angkatan bersenjata dan peralatan militer. Peradilan dikompromikan gagal mencegah atau bahkan memfasilitasi serangan terhadap pengunjuk rasa, serta pembela hak asasi manusia dan kritikus lainnya.

Pemerintah-pemerintah sering menindaklanjuti dengan penangkapan dan penuntutan, dan semakin banyak menggunakan sarana teknologi, termasuk pengenalan wajah dan bentuk pengawasan lainnya, untuk mengidentifikasi para pemimpin dan peserta protes.

PENOLAKAN NEGARA-NEGARA BELAHAN UTARA – PENGUNGSI DAN IMIGRAN

Ada perpindahan massal yang berlangsung pada tahun 2021 yang disebabkan oleh krisis-krisis yang baru maupun yang sudah mengakar. Kejadian-kejadian di tempat-tempat seperti Afghanistan, Myanmar dan Ethiopia menyebabkan gelombang pengungsian baru. Ribuan orang terus meninggalkan Venezuela dan konflik yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo saja menyebabkan 1,5 juta orang meninggalkan rumah mereka pada tahun 2021. Secara global, jutaan orang terus meninggalkan negara mereka karena pelanggaran hak asasi manusia terkait konflik dan kekerasan, ketidaksetaraan, perubahan iklim dan degradasi lingkungan, dengan anggota etnis minoritas termasuk di antara mereka yang paling terpengaruh. Menurut UNHCR, pada pertengahan 2021 ada 26,6 juta pengungsi dan 4,4 juta pencari suaka di seluruh dunia. Sebagian besar harus tinggal di kamp pengungsian selama bertahun-tahun, misalnya di Uganda, Bangladesh, Yordania, Kenya, dan Turki. Banyak di antara mereka yang terus-menerus hidup dalam ketakutan akan

sewaktu-waktu dikembalikan ke negara dari mana mereka melarikan diri untuk mencari keselamatan.

Di tingkat akar rumput, solidaritas tumbuh untuk orang-orang yang berpindah, seperti yang terlihat di semakin banyak negara, sekarang 15 negara yang menawarkan beberapa bentuk skema sponsor yang memungkinkan masyarakat untuk menyambut pengungsi. Namun, solidaritas seperti itu seringkali sangat kurang di tingkat nasional dan internasional. Narasi yang mengandung xenofobia tentang migrasi masih dibiarkan menembus opini publik, terutama di negara-negara belahan Utara (*Global North*), sementara kebijakan domestik semakin menegat. Selusin negara di Uni Eropa meminta pemimpin blok tersebut untuk melemahkan aturan perlindungan pengungsi. Komunitas internasional gagal memberikan dukungan yang memadai dan, yang lebih buruk lagi, membatasi akses ke tempat yang aman.

Pengungsi dan imigran juga terlalu sering menjadi sasaran berbagai pelanggaran – dan pola pelanggaran yang meluas seperti penolakan, penyiksaan, dan kekerasan seksual terus berlangsung dengan impunitas. Banyak pemerintah menghindari tanggung jawab mereka untuk memberikan perlindungan dan melanggar hak dalam upaya mereka untuk mencegah pengungsi dan imigran mencapai wilayah mereka dan mencegah kedatangan spontan. Taktik “memukul mundur” menjadi semakin dinormalisasi, termasuk di beberapa di titik baru seperti perbatasan Belarusia/Uni Eropa. Petugas perbatasan AS melakukan pemukulan mundur massal hampir satu juta pengungsi dan migran di perbatasan AS-Meksiko dengan menggunakan ketentuan kesehatan masyarakat terkait Covid-19 sebagai dalih. Demikian pula, pemerintah-pemerintah semakin berusaha untuk mengeksternalisasi prosedur permohonan suaka nasional (bahkan dalam menghadapi arus pengungsi yang mereka klaim ingin mereka dukung, seperti dari Afghanistan). Pemerintah juga melanjutkan tren penyebaran pengawasan dan teknologi berbasis data sebagai sarana untuk mengamankan dan mengakar kekerasan di perbatasan. Teknologi perbatasan seperti itu sering digunakan secara tidak proporsional terhadap populasi non-kulit putih, dan diskriminatif secara sistemik.

Situasi ini juga sering mengerikan bagi mereka yang berhasil melintasi perbatasan. Banyak pihak berwenang terus secara tidak sah menangkap dan menahan pengungsi dan migran tanpa batas waktu, seringkali tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa mengizinkan mereka untuk menentang legalitas penahanan mereka. Beberapa pemerintah juga terlibat dalam deportasi yang melanggar hukum; Amnesty International mendokumentasikan tuduhan yang kredibel bahwa pengungsi atau migran telah dikembalikan secara tidak sah ke negara mereka atau didorong melintasi perbatasan di setidaknya 48 dari 154 negara yang dipantau pada tahun 2021. Di Libya ribuan orang dihilangkan secara paksa setelah diturunkan oleh penjaga pantai Libya yang didukung Uni Eropa, sementara ratusan lainnya diculik. diusir secara paksa tanpa proses hukum dan ditinggalkan di perbatasan darat. Malaysia mendeportasi lebih dari seribu orang kembali ke Myanmar meskipun ada risiko nyata penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya.

Banyak pemerintah melakukan diskriminasi secara tidak sah terhadap orang-orang yang sedang bepergian, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Di Peru, sekitar satu juta orang asing, termasuk setengah juta pencari suaka terdaftar, tidak dapat mengakses hak-hak seperti perawatan kesehatan. Namun, tekanan untuk mencegah pelanggaran ketenagakerjaan yang meluas terhadap buruh migran terus didorong oleh sorotan pada proyek-proyek terkenal seperti persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar. Hal ini menyebabkan pembenahan di beberapa negara, meskipun isu-isu besar tetap ada. Ada juga seruan yang meningkat untuk menghentikan penahanan imigran, terutama imigran anak-anak.

REKOMENDASI

Untuk memenuhi janji mereka, pemerintah-pemerintah dan lembaga-lembaga harus membangun pemulihan pandemi dan respons krisis mereka secara kokoh di atas kerangka hak asasi manusia, dan memfasilitasi dialog nyata dengan masyarakat sipil sebagai mitra dalam mencapai solusi.

Semua pemerintah harus menerapkan langkah-langkah, termasuk undang-undang, untuk mencegah pengembang vaksin menghalangi akses ke vaksin Covid-19. Negara-negara kaya khususnya harus mendistribusikan kembali surplus stok vaksin Covid-19 ke negara-negara berpenghasilan rendah dan meningkatkan keringanan utang untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi. Perusahaan farmasi harus memprioritaskan pengiriman di tempat yang paling membutuhkan. Perusahaan media sosial harus mengambil tindakan nyata untuk menanggapi secara memadai penyebaran informasi palsu atau menyesatkan.

Pemerintah harus berhenti menggunakan pandemi sebagai alasan untuk membungkam jurnalisme dan debat independen dan segera mencabut semua pembatasan yang tidak semestinya atas hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Bersama dengan itu, pemerintah harus mengadopsi atau memperluas undang-undang yang memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan memungkinkan bagi orang-orang untuk berkumpul bersama untuk membela dan memajukan hak asasi manusia, dan mencabut atau mengubah undang-undang yang menghalangi aktivitas sah LSM, termasuk mencari, menerima dan memanfaatkan pendanaan. Juga penting bagi pemerintah untuk mencabut skema peraturan yang memerlukan otorisasi sebelumnya untuk mengadakan pertemuan damai, dan memastikan bahwa peraturan darurat dan tindakan pembatasan lainnya yang diadopsi selama pandemi tidak menjadi "normal baru". Mereka harus memberlakukan kontrol yang lebih ketat pada ekspor dan impor peralatan yang dapat memiliki fungsi penegakan hukum yang sah tetapi mudah disalahgunakan, seperti pentungan, gas air mata, semprotan merica, dan peluru karet.

Pemerintah harus memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi orang-orang yang mencari perlindungan internasional, menghormati dan melindungi hak-hak mereka dan memungkinkan mereka untuk tetap berada di wilayah mereka, dalam kondisi yang layak, sampai solusi yang tahan lama ditemukan. Mereka harus menghentikan penolakan dan eksternalisasi, dan mendukung sponsor komunitas. Pemerintah harus mengakhiri pelanggaran termasuk diskriminasi terhadap migran, berhenti menahan imigran anak, dan memperdalam reformasi untuk mengakhiri pelanggaran perburuhan.

RINGKASAN KAWASAN ASIA – PASIFIK

Beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik mengalami krisis hak asasi manusia yang parah sepanjang tahun. Di Myanmar, penentangan yang meluas terhadap kudeta militer pada bulan Februari disambut dengan tanggapan ganas dari militer di mana ratusan orang tewas dan ribuan ditahan secara sewenang-wenang. Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan pada bulan Agustus disertai dengan kejahatan perang dan pembatasan mendadak terhadap hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan yang sebelumnya diperjuangkan dengan susah payah. Di Cina, kejahatan terhadap kemanusiaan terus berlanjut terhadap Muslim yang tinggal di Xinjiang, dan situasi hak asasi manusia memburuk, khususnya di Hong Kong. Kegagalan selama bertahun-tahun untuk menanamkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran hak asasi manusia secara langsung berkontribusi pada bencana hak asasi manusia yang sedang berlangsung ini.

Banyak pemerintah terus menggunakan pandemi Covid-19 sebagai dalih untuk menekan hak. Undang-undang baru diberlakukan di beberapa negara untuk mengkriminalisasi penyebaran informasi "palsu" atau "bohong" tentang Covid-19, dan undang-undang yang ada digunakan untuk membungkam kritik dan mencegah serta membubarkan protes.

Hal ini mencerminkan tumbuhnya intoleransi terhadap perbedaan pendapat di wilayah tersebut. Kontrol terhadap media dan internet diperketat di banyak negara. Lawan politik dan pihak lain yang mengkritik kebijakan atau tindakan pemerintah dikenai pembatasan dan hukuman yang semakin keras. Kekuatan berlebihan sering digunakan terhadap pengunjuk rasa damai, dan pemerintah di seluruh wilayah tidak hanya gagal melindungi hak-hak pembela hak asasi manusia, tetapi juga secara aktif mencegah mereka melakukan pekerjaan vital mereka.

Banyak pemerintah yang masih tidak siap untuk merespon lonjakan baru infeksi Covid-19. Kegagalan mereka untuk mendanai sektor kesehatan secara memadai, mengatasi korupsi dan melindungi hak-hak tenaga kesehatan di tempat kerja membuat ribuan orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan secara memadai serta mengakibatkan kematian yang sebenarnya dapat dihindari.

Di luar Afghanistan, situasi perempuan dan anak perempuan memburuk di banyak negara dalam konteks pandemi dan pembatasan terkait. Di tengah ketiadaan bantuan sosial yang memadai, perempuan yang bekerja di sektor informal termasuk di antara mereka yang semakin terjerumus dalam kemiskinan. Di berbagai wilayah di kawasan, perempuan dan anak perempuan terus menghadapi kekerasan berbasis gender dan seksual tingkat tinggi yang hanya ada sedikit atau tidak ada pertanggungjawaban. Kampanye yang menyerang kelompok LGBTI dilancarkan di beberapa negara. Di berbagai wilayah di kawasan, masyarakat adat semakin menderita akibat degradasi lingkungan.

Puluhan ribu orang di Afghanistan dan Myanmar terpaksa mengungsi atau mencari perlindungan di negara lain. Namun, banyak dari mereka yang dipulangkan secara tidak sah dari negara-negara tetangga ke situasi di mana mereka berada dalam risiko pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Di negara lain, pemerintah menolak masuknya pencari suaka serta menahan dan memperlakukan pengungsi dan migran dengan buruk.

REPRESI TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT

Ruang perbedaan pendapat kian menyempit di kawasan Asia-Pasifik. Pemerintah militer baru di Myanmar berusaha untuk membungkam oposisi yang menolak kudeta dengan menindak keras protes di seluruh negeri dan menangkap anggota dari mantan partai yang berkuasa serta aktivis pro-demokrasi. Segera setelah pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan, Taliban membatasi

kebebasan pers dan menggunakan kekuatan untuk membubarkan protes terhadap kebijakannya. Di Korea Utara, siapapun yang dianggap sebagai ancaman bagi kepemimpinan atau sistem politik negara diasingkan di penjara politik atau dijatuhi hukuman “reformasi melalui kerja”. Pihak berwenang di banyak negara mengancam, menangkap, menahan dan, di beberapa kasus, membunuh lawan politik dan orang lainnya yang mengkritik mereka.

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Berbagai pemerintah terus menjustifikasi undang-undang yang represif dan tindakan lainnya yang membatasi kebebasan berekspresi sebagai hal yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran disinformasi tentang Covid-19. Pemerintah Malaysia memberlakukan peraturan yang memberikannya kewenangan tak terbatas untuk membungkam kritik dengan dalih mencegah “berita palsu” tentang Covid-19. Di Cina, Bangladesh, Fiji dan Vietnam, pihak berwenang menangkap dan menuntut orang-orang yang mengkritik penanganan Covid-19. Pihak berwenang di Sri Lanka mengeluarkan ancaman tindakan disipliner terhadap karyawan di sektor kesehatan yang berbicara kepada media tentang kekhawatiran mereka terkait penanganan Covid-19 di sana.

Media independen diserang di berbagai wilayah di kawasan. Di Myanmar, otoritas militer menutup publikasi berita, mencabut izin perusahaan media dan menangkap para jurnalis. Jurnalis juga ditahan, dipukuli dan dilecehkan di Afghanistan, di mana peraturan baru tentang media secara efektif melarang kritik apapun terhadap Taliban; hingga Oktober, lebih dari 200 perusahaan media telah ditutup.

Pihak berwenang di Singapura mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap blogger dan jurnalis serta menggunakan tuduhan palsu terkait penyimpangan keuangan untuk menutup situs berita independen, The Online Citizen. Di India, pihak berwenang menggerebek kantor harian berbahasa Hindi setelah publikasi berita mengenai pembuangan massal jenazah korban Covid-19 di sepanjang Sungai Gangga. Di Filipina, karya jurnalis Marie Ressa diakui ketika dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian, namun dia menghadapi ancaman puluhan tahun di penjara atas kasus-kasus yang dituduhkan kepadanya terkait kritiknya terhadap pemerintah.

Banyak pemerintah berusaha untuk lebih mengontrol akses terhadap dan penyebaran informasi daring lainnya. Pemerintah Singapura memberlakukan undang-undang baru yang memberinya kewenangan besar untuk menghapus atau memblokir konten daring yang diduga merupakan “campur tangan asing”. Undang-undang baru di Kamboja mengharuskan semua lalu lintas internet untuk melalui badan pengawas yang bertugas “memantau” aktivitas daring. Di Cina, pihak berwenang memerintahkan penyedia jasa internet untuk memutus akses ke situs web yang “membahayakan keamanan nasional” dan memblokir aplikasi yang membahas topik-topik kontroversial seperti Xinjiang dan Hong Kong. Di Pakistan, undang-undang represif yang menyensor konten daring juga diberlakukan.

Pihak berwenang di banyak negara juga menggunakan undang-undang yang sudah berlaku untuk menangkap dan menuntut suara-suara yang berbeda pendapat, termasuk jurnalis, aktivis dan pendidik. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur hukuman penjara hingga maksimal enam tahun, digunakan terhadap setidaknya 100 orang yang memberikan kritik yang sah terhadap kebijakan atau tindakan resmi. Ketua Amnesty International India, Aakar Patel, ditangkap dan didakwa “menciptakan ketidakharmonisan komunal” setelah menuliskan kekhawatirannya tentang permusuhan terhadap komunitas Muslim Ghanchi melalui Twitter. Pihak berwenang Nepal menggunakan Undang-Undang Transaksi Elektronik untuk secara sewenang-wenang menahan mereka yang mengkritik pemerintah dan pemimpin partai penguasa. Di Thailand, setelah jeda dua tahun, pihak berwenang kembali menggunakan hukum *lèse majesté*. Seorang mantan pegawai negeri, yang termasuk ke dalam 116 orang yang didakwa menggunakan hukum tersebut karena mengkritik kerajaan, dijatuhi hukuman 87 tahun penjara.

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL

Gelombang protes terjadi di berbagai wilayah di kawasan sebagai tanggapan atas perkembangan politik, kesalahan penanganan Covid-19, hak-hak pekerja, dan isu lainnya.

Peraturan yang dirancang untuk mencegah penyebaran Covid-19 digunakan di beberapa negara untuk mencegah dan membubarkan protes damai. Di Malaysia, pihak berwenang menggunakan undang-undang pengendalian Covid-19 dan aturan lainnya untuk lebih mengintensifkan tindakan keras terhadap hak-hak atas kebebasan berkumpul, termasuk acara peringatan untuk korban Covid-19 yang kemudian dibubarkan secara sewenang-wenang, di mana para peserta diancam, ditangkap, dan didenda. Di Maladewa, pihak berwenang juga menggunakan panduan kesehatan terkait Covid untuk membubarkan protes, terutama yang diselenggarakan oleh kelompok oposisi politik. Di Mongolia, larangan demonstrasi di bawah pembatasan Covid-19 juga digunakan untuk secara sewenang-wenang membubarkan protes damai dan untuk menangkap, menahan, serta mendenda penyelenggara protes.

Penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai terjadi di setidaknya 10 negara di kawasan. Pihak militer di Myanmar merespon protes terhadap kudeta yang berskala nasional dengan kekerasan yang mematikan serta menggunakan taktik dan senjata yang seharusnya hanya untuk di medan perang terhadap pengunjuk rasa damai. Jumlah pengunjuk rasa yang terbunuh telah mencapai 1.400 orang di akhir tahun.

Di India, polisi menggunakan tongkat untuk memukul petani yang secara damai melakukan protes atas undang-undang pertanian yang kontroversial pada bulan Agustus. Aparat keamanan di Indonesia menggunakan meriam air, pentung karet dan peluru karet untuk membubarkan demonstrasi damai menolak revisi UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di bulan Juli.

Polisi anti-huru hara di Thailand berulang kali merespon protes yang menyerukan reformasi politik dan penanganan pandemi yang lebih baik dengan kekerasan, yaitu dengan menembakkan peluru karet dan tabung gas air mata dari jarak dekat ke pengunjuk rasa, jurnalis, dan warga di sekitarnya secara semena-mena. Dalam satu peristiwa, beberapa anak terluka dan satu tewas setelah peluru tajam digunakan untuk melawan pengunjuk rasa. Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh lembaga penegak hukum terhadap demonstrasi, termasuk yang mendukung hak-hak Pashtun, mengakibatkan sejumlah orang terluka dan setidaknya satu kematian.

Masalah baru juga berdampak kepada hak atas kebebasan berserikat karena pemerintah di seluruh wilayah menerapkan berbagai tindakan yang lebih luas terhadap partai politik dan aktivis, serikat pekerja dan LSM.

Di Kamboja, pengadilan massal untuk anggota partai oposisi terlarang, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (*Cambodia National Rescue Party*), berlangsung di mana sembilan pemimpin senior dinyatakan bersalah tanpa kehadiran mereka di pengadilan dan dijatuhi hukuman hingga 25 tahun penjara. Di Vietnam, seorang jurnalis warga yang melamar menjadi calon independen dalam pemilihan Majelis Nasional ditangkap dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Dampak nyata dan mengerikan dari Undang-Undang Keamanan Nasional (NSL) Hong Kong 2020 menjadi terlihat sepanjang tahun. Setidaknya 61 organisasi masyarakat sipil dibubarkan karena UU tersebut, termasuk serikat profesional terbesar di Hong Kong. Semua kemungkinan adanya oposisi politik yang terorganisir, secara efektif berakhir setelah peranakan puluhan anggota partai oposisi pada bulan Januari. Pada bulan Oktober, Amnesty International mengumumkan penutupan dua kantornya di Hong Kong karena risiko pembalasan di bawah UU NSL.

Tekanan terhadap LSM nasional dan internasional di India juga meningkat di mana banyak organisasi yang bekerja di bidang hak asasi manusia dan isu-isu terkait lingkungan telah ditangguhkan izinnya, pendaftarannya dibatalkan atau diwajibkan untuk meminta izin pemerintah untuk setiap dana yang diterima atau dicairkan. Di Maladewa, sebuah LSM yang dihormati secara

luas, Jaringan Demokrasi Maladewa (*Maldivian Democracy Network*), masih terus diselidiki oleh pihak berwenang.

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Pembela HAM dibunuh di beberapa negara, termasuk di Afghanistan di mana mereka menjadi sasaran pembunuhan di luar hukum oleh aktor non-negara. Setelah pengambilalihan Taliban, banyak yang meninggalkan negara tersebut atau bersembunyi, termasuk diantaranya Komisaris dan staf Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan (Afghan Independent Human Rights Commission). Di Filipina, pembela HAM dan lingkungan termasuk di antara mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok komunis, atau “diberi label merah”, yang secara efektif memberikan izin kepada pasukan keamanan untuk membunuh mereka.

Pihak berwenang China mengintensifkan tindakan keras mereka terhadap para pembela HAM. Banyak yang ditahan untuk waktu yang lama, dan laporan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap mereka adalah hal yang umum. Beberapa pengacara hak asasi manusia dan aktivis yang ditahan pada tahun-tahun sebelumnya masih hilang. Sementara itu di Hong Kong, 24 orang divonis penjara karena memperingati secara damai para korban penumpasan Lapangan Tiananmen 1989.

Di tempat lain, termasuk Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam, para pembela HAM dilecehkan, diancam, ditahan, dituntut dan/atau dipenjarakan. Di Indonesia, serangan fisik, serangan digital, ancaman dan bentuk serangan lainnya terhadap lebih dari 357 pembela HAM dilaporkan sepanjang tahun. Di Bangladesh, para pembela HAM, jurnalis dan aktivis termasuk di antara ratusan orang yang dipenjara akibat dari berlakunya Undang-Undang Keamanan Digital. Di Nepal, polisi menahan 13 aktivis pada bulan Oktober, yang sebelumnya secara damai menuntut penyelidikan yang tidak memihak atas kematian seorang wanita dan hilangnya seorang wanita lainnya di distrik Banke.

Tingkat pengawasan terhadap pembela HAM oleh beberapa pemerintah juga menjadi tampak jelas. Di India, di mana banyak aktivis HAM secara resmi ditetapkan sebagai “musuh negara”, operasi pengawasan besar-besaran yang melanggar hukum terhadap pembela HAM terungkap. Di Vietnam, investigasi oleh Amnesty International mengungkapkan kampanye pengawasan tidak sah yang menargetkan pembela HAM baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam perkembangan yang positif, Mongolia mengesahkan undang-undang yang mengkonsolidasikan perlindungan hukum bagi para pembela HAM. Namun, para aktivis, termasuk penggembala yang bekerja pada isu-isu lingkungan dan hak atas tanah, terus menghadapi ancaman, intimidasi dan penuntutan atas kegiatan sah mereka.

HAK ATAS KESEHATAN

Kurangnya investasi dan praktik korupsi berkontribusi pada ketidakmampuan yang berkelanjutan dari sektor kesehatan masyarakat di kawasan untuk merespons pandemi Covid-19 secara memadai. Di beberapa negara, kekurangan staf, tempat tidur, dan peralatan membuat pasien Covid-19 tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai. Hal ini mengakibatkan ribuan kematian yang sebenarnya dapat dicegah, termasuk di India dan Nepal, yang mengalami lonjakan infeksi yang tajam sepanjang tahun. Di India, serta Filipina, ada kekhawatiran tentang kurangnya transparansi atau penyimpangan dalam penanganan dana pemerintah untuk respons pandemi.

Gejolak politik di Afghanistan dan Myanmar hampir membawa sistem perawatan kesehatan yang sudah rapuh menjadi hampir runtuh. Penangguhan bantuan untuk sektor kesehatan di Afghanistan oleh donor internasional mengakibatkan penutupan setidaknya 3.000 fasilitas kesehatan, termasuk

rumah sakit Covid-19. Di Myanmar, akses ke layanan kesehatan terhambat oleh berbagai serangan terhadap fasilitas dan personel kesehatan.

Akses ke vaksin Covid-19 bermasalah di beberapa negara. Pihak berwenang di Korea Utara membantah kabar adanya Covid-19 di negara itu dan menolak tawaran jutaan dosis vaksin melalui inisiatif COVAX. Nepal tidak menerima pasokan vaksin yang diharapkan, dan 1,4 juta orang harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima dosis kedua.

Informasi yang salah juga berkontribusi pada rendahnya penyerapan di beberapa negara. Di Papua Nugini misalnya, di mana hanya 3% dari populasi yang telah divaksinasi pada akhir tahun, pemerintah gagal memberikan informasi tentang virus dan program vaksinasi secara tepat waktu, selain masalah akses terhadap informasi tersebut.

Pihak berwenang di beberapa negara juga terus mengabaikan seruan untuk mengurangi populasi penjara guna membatasi penyebaran Covid-19. Sekitar 87.000 kasus tercatat di antara tahanan di penjara Thailand yang kurang layak kebersihannya dan penuh sesak. Di Pakistan, vaksin dilaporkan diprioritaskan untuk tahanan, dan beberapa tahanan di negara bagian Sindh dibebaskan sebagai tindakan pencegahan. Namun, otoritas penjara di negara bagian lain berhenti melaporkan tingkat infeksi di antara para tahanan.

Tindakan penutupan wilayah yang ketat juga berdampak kepada hak atas kesehatan dan makanan yang memadai di beberapa negara. Di Vietnam, penduduk di Kota Ho Chi Minh tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka selama berminggu-minggu, membuat banyak orang berada dalam posisi rawan pangan dan tingkat kelaparan yang parah. Tindakan serupa diberlakukan oleh pihak berwenang di Kamboja di beberapa kota, yang berdampak serius terhadap akses penduduk terhadap makanan, pelayanan kesehatan, serta barang dan jasa penting lainnya.

HAK-HAK PEKERJA

Pandemi terus menempatkan beban besar pada tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Di banyak negara mereka bekerja dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi, tanpa perlindungan atau gaji yang memadai. Di Mongolia, tenaga kesehatan menjadi sasaran pelecehan oleh pihak berwenang dan serangan fisik oleh pasien yang frustrasi dan putus asa. Di India, petugas kesehatan masyarakat tidak diberi upah atau APD yang memadai. Di Indonesia, pencairan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan sebagai pengakuan atas pekerjaannya selama pandemi Covid-19 tertunda.

Dampak sosio-ekonomi dari pandemi serta pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan pandemi juga berdampak secara disproportional kepada kelompok yang telah termarginalkan, termasuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan reguler. Di Nepal, misalnya, kasta Dalit dan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk pekerja yang mendapat pendapatan harian, terdampak kondisi ekonomi yang memburuk di sana. Di Vietnam, pekerja migran perempuan, termasuk pedagang kaki lima, mengalami dampak yang parah, dengan banyak orang melaporkan kekurangan makanan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

HAK-HAK PENGUNGS DAN MIGRAN

Kejadian-kejadian di Afghanistan dan Myanmar mengarah pada gelombang baru perpindahan atau *displacement* di wilayah tersebut. Menyusul evakuasi kacau dari Bandara Kabul pada bulan Agustus, banyak penduduk melarikan diri menuju Pakistan and Iran, namun pembatasan pemberangkatan serta penutupan perbatasan negara yang diterapkan oleh Taliban mengancam hak

mereka untuk mendapatkan suaka di negara ketiga. Pada akhir tahun, lebih dari satu juta warga Afghanistan yang tidak terdokumentasi telah kembali dari Iran dan Pakistan, yang sebagian besar bukan atas kehendaknya sendiri.

Pencari suaka dan migran dari Myanmar juga dikembalikan secara paksa atau ditolak memasuki negara-negara lain dalam kawasan. Penjaga perbatasan Thailand menolak sekitar 2.000 penduduk Karen yang menyelamatkan diri dari serangan udara militer. Aparat di Malaysia mendeportasi lebih dari seribu orang untuk kembali ke Myanmar sekalipun dengan adanya risiko serius persekusi dan pelanggaran HAM lainnya.

Situasi hak asasi manusia di Myanmar juga membuat repatriasi sukarela pengungsi Rohingya di Bangladesh tidak memungkinkan. Namun, hak-hak mereka terus dibatasi di Bangladesh, di mana mereka juga rentan terhadap kekerasan. Lebih dari 19.000 orang dipindahkan ke pulau terpencil, Bhasan Char, di mana hak mereka atas kebebasan bergerak dilanggar.

Di beberapa negara lainnya, pengungsi dan migran mengalami penahanan jangka panjang dan perlakuan buruk. Di Jepang, pencari suaka dan migran ireguler (*irregular migrants*) ditahan dalam waktu yang tidak tentu. Sebuah penyelidikan terhadap kematian perempuan Sri Lanka di tahanan imigrasi menemukan bahwa pelayanan medis tidak diberikan secara memadai kepadanya. Otoritas Australia masih menahan pengungsi dan pencari suaka secara sewenang-wenang dan tanpa jangka waktu yang tentu, baik di dalam negaranya maupun di luar (*offshore*). Pencari suaka yang ditahan di New Zealand mengalami perlakuan buruk, meski kemudian pemerintah New Zealand mengumumkan adanya peninjauan terhadap praktek penahanan pencari suaka di fasilitas tahanan kriminal hanya dengan alasan isu imigrasi.

Di negara-negara termasuk Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam, tindakan pencegahan Covid-19 secara tidak adil mendiskriminasi pekerja migran.

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Terdapat kemunduran-kemunduran signifikan terkait hak-hak perempuan dan anak perempuan di wilayah ini. Di Afghanistan, kemajuan yang dicapai selama 20 tahun menuju perlindungan dan perbaikan hak-hak perempuan terhapuskan dalam sekejap. Perempuan dieksklusi dari representasi dalam pemerintahan Taliban yang baru, dan dilarang untuk bekerja dalam banyak sektor. Akses pendidikan bagi anak-anak perempuan juga sangat dibatasi, dan pembela HAM perempuan, jurnalis, hakim, dan jaksa mendapatkan ancaman serta intimidasi. Protes-protes yang mendukung hak-hak perempuan dihadapkan dengan kekerasan oleh Taliban.

Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, yang telah menjadi endemi di banyak negara di wilayah ini, semakin meningkat dalam konteks respon negara-negara terhadap Covid-19. Peningkatan angka kekerasan berbasis gender dilaporkan, misalnya di Bangladesh, Fiji, Papua Nugini, dan Sri Lanka.

Tuntutan untuk akuntabilitas dalam kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan yang lebih kuat hanya mendapatkan sedikit keberhasilan. Pemerintah Cina melakukan kampanye yang dapat dianggap tidak baik terhadap perempuan-perempuan yang diasingkan - yang sebelumnya ditahan di Xinjiang - yang bicara mengenai kekerasan seksual dalam apa yang disebut "pusat re-dukasi". Di Pakistan, RUU kekerasan domestik disahkan oleh parlemen, namun oposisi yang berasal dari partai-partai konservatif dilaporkan membuat pemerintahan untuk meminta badan penasihat keagamaan untuk meninjaunya. Sementara itu, kurangnya akuntabilitas dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan berbasis gender di sana tetap menjadi praktek umum. Di Nepal, tidak ada kemajuan yang dicapai menuju reformasi ketetapan konstitusional yang menolak hak-hak kewarganegaraan yang setara bagi perempuan, atau menghapus batas hukum (*statutory limitation*) yang berlebihan bagi kasus pemerkosaan.

HAK-HAK LGBTI

Komunitas LGBTI masih mengalami persekusi dan diskriminasi secara hukum dan dalam praktek sehari-hari di banyak negara Asia Pasifik. Hubungan seksual konsensual masih dikriminalisasi di beberapa negara.

Kampanye anti-LGBTI dilakukan di beberapa negara. Di Malaysia, lebih dari 1.700 orang dikirim ke kamp rehabilitasi yang dijalankan oleh pemerintah dan dirancang untuk mengubah “gaya hidup” dan “orientasi seksual” orang-orang LGBTI. Otoritas Cina melanjutkan kampanye mereka untuk “membersihkan” internet dari representasi LGBTI. Laki-laki yang terlihat feminin dilarang untuk tampil di televisi, akun media sosial organisasi-organisasi LGBTI ditutup. Di Afghanistan, Taliban memperjelas bahwa mereka tidak akan menghormati hak-hak LGBTI.

Kemajuan-kemajuan kecil berhasil tercapai melalui rekognisi pernikahan sesama jenis di Taiwan, namun komunitas LGBTI terus menghadapi diskriminasi.

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Kepentingan komersial dan degradasi lingkungan kian melanggar batas tradisi dan kehidupan masyarakat Adat di wilayah Asia Pasifik, dan perlindungan hukum terhadap mereka dapat dianggap diperlemah di setidaknya satu negara. Di Bangladesh, masyarakat Adat mengalami kelangkaan sumber daya akibat meningkatnya deforestasi dan perampasan tanah. Masyarakat adat di Papua Nugini memprotes dampak penambangan laut dalam untuk mineral dan logam terhadap keberlangsungan hidup serta budaya mereka. Sebuah komunitas Adat di Malaysia mengajukan tinjauan judicial terhadap pemerintah Selangor untuk melawan rencana pemerintah untuk mengusir mereka dari tanah mereka demi proyek pariwisata. Di Nepal dan Thailand, masyarakat adat yang telah diusir secara paksa pada tahun-tahun sebelumnya tidak diizinkan untuk kembali atau diberikan tanah atau mata pencaharian alternatif.

Di Fiji, parlemen mengesahkan amandemen terhadap UU Perwalian Tanah iTaukei (*iTaukei Land Trust Act*) yang menghapus ketentuan adanya persetujuan untuk hipotek dan sewa atas tanah yang dimiliki masyarakat Adat, berujung pada berlangsungnya protes-protes di mana lebih dari 12 orang ditangkap. Pengadilan di Taiwan mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat Adat terhadap tanah dan praktek berburu tradisional mereka, namun legislasi yang ada masih belum memberikan perlindungan secara cukup.

Di Kamboja, masyarakat Adat dan aktivis hutan di tingkat akar rumput mengalami penolakan akses terhadap tanah tradisional mereka atas alasan aktivitas konservasi. Di sana dan di tempat-tempat lainnya, upaya untuk melindungi tanah mereka direspons dengan penangkapan dan kekerasan. Di Indonesia, masyarakat Adat di Provinsi Sumatra Utara dan Riau diserang dengan kekerasan oleh penjaga keamanan yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan kertas ketika berupaya menghentikan penanaman pohon kayu putih di tanah mereka.

Di Filipina, masyarakat Adat dan aktivis hak-hak masyarakat Adat ditangkap dan dibunuh. Pelaku yang tidak diketahui menembak mati kepala desa, Julie Catamin, yang merupakan saksi dalam kasus terkait penggrebekan polisi pada Desember 2020, di mana para pemimpin masyarakat komunitas Tumandok ditangkap dan beberapa lainnya dibunuh. Di India, perempuan Dalit dan Adivasi (Adat) masih menghadapi risiko kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dari kelas-kelas sosial yang dominan.

KEJAHATAN DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL

Amnesty International mengumpulkan bukti konklusif bahwa pemerintah Cina melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya, penyiksaan dan persekusi terhadap kelompok-kelompok etnis mayoritas Muslim yang tinggal di Xinjiang. Terlepas dari klaim dari mereka yang menyatakan sebaliknya, pemerintah Cina melanjutkan kampanye penahanan massal yang sewenang-wenang, ditambah dengan adanya kekerasan serta intimidasi untuk membasmi kepercayaan keagamaan Islam dan praktek etnobudaya Muslim Turkic.

Pihak-pihak dalam konflik di Afghanistan melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan perang. Kelompok Etnis Hazara seringkali menjadi target, termasuk selama serangan dan pengambilalihan Taliban. Lebih dari 100 mantan anggota pasukan keamanan secara paksa dihilangkan atau dieksekusi secara ekstrajudisial oleh Taliban, dan sembilan orang tentara Hazara yang menyerahkan diri dieksekusi, hanya di Daykundi saja. Beberapa pembantaian oleh Taliban terhadap masyarakat sipil Hazara juga terjadi, termasuk di Provinsi Ghazni dan Daykundi.

Di Myanmar, militer bertanggungjawab atas serangan-serangan yang tidak pandang bulu serta serangan-serangan yang ditujukan terhadap masyarakat sipil. Pemblokiran akses humaniter kepada populasi pengungsi internal juga dilaporkan terjadi. Dua pekerja humaniter dari organisasi Save the Children menjadi bagian dari mereka yang dibunuh oleh militer di Negara Bagian Kayah timur pada Desember.

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA

Kemajuan yang terbatas berhasil dicapai dalam mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk lain perlakuan buruk yang masih pervasif di banyak negara di Asia Pasifik. Terdapat upaya-upaya di Pakistan dan Thailand untuk mengkriminalisasi penyiksaan. Namun, legislasi yang diusulkan di Thailand tidak sepenuhnya konsisten dengan standar-standar internasional. Di Sri Lanka, aturan-aturan baru yang disahkan di bawah Hukum Pencegahan Aksi Terorisme (*Prevention of Terrorism Act*) berpotensi meningkatkan risiko penyiksaan terhadap tahanan.

Penyiksaan dan perlakuan buruk tetap dilaporkan di negara-negara ini serta lainnya. Di Myanmar, penggunaan siksaan serta perlakuan buruk secara luas kepada orang-orang yang ditahan karena mengoposisi kudeta telah terdokumentasi, dan dalam beberapa kasus berujung pada kematian. Otoritas Cina terus menggunakan siksaan terhadap tahanan di Xinjiang dan tempat lainnya serta memproses mereka yang bicara mengenai pengalamannya. Di Nepal, penyiksaan dan perlakuan buruk secara luas digunakan dalam penahanan pra-sidang untuk mendapatkan “pengakuan” dan mengintimidasi tahanan. Belum terdapat pengakuan di bawah Hukum Pidana 2017, yang mengkriminalisasi praktek-praktek ini. Kematian dalam tahanan atau sesaat setelah dibebaskan masih wajar ditemukan di Malaysia, dan dalam beberapa kasus dapat dikaitkan dengan pemukulan dan bentuk kekerasan lainnya yang terjadi selama masa tahanan.

IMPUNITAS

Impunitas dalam pelanggaran-pelanggaran HAM serius dan kejahatan di bawah hukum internasional masih menjadi kekhawatiran serius di sejumlah besar negara.

Keadilan bagi korban-korban kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran HAM berat lain yang terjadi selama konflik bersenjata masa lampau di Nepal dan Sri Lanka masih belum terwujud. Di Nepal, mekanisme keadilan transisional gagal memecahkan satu pun kasus. Menyusul

kegagalan berulang oleh pemerintah Sri Lanka untuk mengedepankan keadilan di ranah domestik, Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi untuk mendirikan mekanisme untuk mengumpulkan bukti kejahatan-kejahatan internasional yang diperbuat oleh pihak-pihak dalam konflik.

Dengan tidak adanya perkembangan di tingkat domestik, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tetap melanjutkan penyelidikan di dua negara. Namun, penyelidikan di Filipina atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam konteks perang melawan narkoba dihentikan sementara sembari ICC mempertimbangkan permintaan penangguhan dari pemerintah Filipina. ICC juga melanjutkan penyelidikan di Afghanistan. Namun, apabila ICC hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan Taliban dan Islamic State (IS) sembari menghiraukan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan keamanan pemerintah Afghanistan dan personel militer serta intelijen Amerika Serikat, hal tersebut berisiko mempertaruhkan reputasi ICC dan membiarkan impunitas mengakar. Pihak berwenang Australia gagal mengambil tindakan terhadap pasukan khusus miliknya yang dirujuk untuk diselidiki pada tahun 2020 sehubungan dengan dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Afghanistan.

Impunitas terus memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia di banyak tempat, termasuk di India di mana penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya dilakukan dalam skala yang besar dan secara sistematis. Di Pakistan, sebuah RUU yang mengusulkan amandemen Undang-Undang Hukum Pidana untuk mempidanakan kasus penghilangan secara paksa telah diajukan ke parlemen, tetapi RUU tersebut tetap tidak cukup untuk melindungi dari kejahatan ini. Di Bangladesh, daripada menyelidiki dugaan kasus penghilangan dan pembunuhan di luar hukum, pemerintah Bangladesh menolak pertanggung jawaban atau mengklaim bahwa pasukan keamanan mereka bertindak atas dasar “perlindungan diri”. Begitu pula dengan pasukan keamanan Indonesia yang terus melakukan pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat, sebagian besar karena adanya impunitas.

REKOMENDASI

Terlepas dari beberapa perkembangan positif, pengikisan penghormatan terhadap dan perlindungan hak asasi manusia masih terus berlanjut di kawasan Asia Pasifik. Kondisi tragis yang terjadi di Afghanistan dan Myanmar tidak mengejutkan mengingat krisis tersebut terjadi di wilayah yang sering mengabaikan hak asasi manusia, pemerintah yang semakin intoleran terhadap kritik, diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok marginal kerap terjadi, serta impunitas yang masih mengakar.

Pemerintah harus menghormati dan memfasilitasi penegakkan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat. Undang-undang yang membatasi hak-hak tersebut, termasuk peraturan yang membatasi pemberitaan media, akses internet dan organisasi non pemerintah, harus dicabut serta penangkapan secara satu pihak dan penahanan sewenang-wenang terhadap kritikus pemerintah harus dihentikan. Pekerjaan pembela hak asasi manusia juga harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah harus mengambil pelajaran dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam menangani pandemi Covid-19 dan berkomitmen untuk berinvestasi lebih di sistem kesehatan serta melindungi hak atas kesehatan.

Peningkatan upaya bersama dibutuhkan oleh pemerintah negara-negara di kawasan untuk mengembalikan keadaan setelah kemunduran penegakkan hak perempuan dan anak perempuan akibat pandemi, serta untuk mengatasi kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Tekanan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan juga harus ditingkatkan untuk melawan kemunduran hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan.

Pemerintah di seluruh dunia harus menahan diri untuk mengembalikan siapapun ke Afghanistan atau Myanmar, terlepas dari status imigrasinya, sampai perlindungan hak asasi mereka terjamin. Penahanan pencari suaka atas dasar status imigrasi juga harus diakhiri.

Pemerintah harus meningkatkan upaya melawan impunitas dengan cara melakukan penyelidikan yang menyeluruh, independen, imparial, efektif, dan transparan terhadap kejahatan yang dilakukan di bawah hukum internasional serta mengadili tersangka pelaku. Kerja sama penuh harus diperluas hingga proses peradilan internasional.

INDONESIA

Republik Indonesia

Kepala Negara dan Pemerintah:

Presiden Joko Widodo

Pembela hak asasi manusia, akademisi, jurnalis dan mahasiswa adalah sebagian kelompok yang diperseniusi dan dilecehkan karena kegiatan sah secara hukum yang mereka lakukan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara luas digunakan untuk membatasi hak atas kebebasan berekspresi secara daring. Aktivis politik dan hak buruh dan masyarakat adat adalah sebagian kelompok yang ditahan dan diperseniusi, termasuk karena berpartisipasi dalam protes damai, serta kekerasan berlebihan digunakan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Setidaknya terdapat 28 tahanan hati nurani masih dipenjara. Pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat, sebagian besar dengan impunitas. Pola diskriminasi terhadap jamaah Ahmadiyah juga terus berlanjut.

LATAR BELAKANG

Peningkatan persebaran Covid-19 yang tajam di pertengahan tahun 2021 mengancam akses ke kesehatan karena banyaknya rumah sakit yang tidak bisa menyediakan kasur atau oksigen untuk perawatan pasien. Tantangan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap respons pemerintah dalam mengatasi pandemi turut berkontribusi pada meningkatnya penolakan dan protes dari masyarakat.

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Terdapat setidaknya 158 serangan fisik, serangan digital, ancaman dan bentuk serangan lainnya terhadap 367 pembela HAM yang dilaporkan sepanjang tahun.

Pada bulan Februari, ayah dan anak, Syamsul Bahri dan Samsir dari kelompok Tani Nipah di Provinsi Sumatera Utara yang

dituduh melakukan penyerangan, ditangkap dan ditahan selama 14 hari setelah perkara di bulan Desember 2020 ketika Syamsul Bahri, ketua kelompok tani, mempertanyakan niat dua orang yang mengambil foto saat mereka sedang mengerjakan proyek rehabilitasi mangrove di kawasan tersebut. Organisasi non-pemerintah setempat percaya bahwa tuduhan penyerangan tersebut berkaitan dengan aktivitas Syamsul Bahri dan Samsir dalam melestarikan serta mempertahankan hak akses atas tanah komunitas mereka. Mereka divonis bersalah pada 31 Mei dan dijatuhi hukuman dua bulan penjara yang ditangguhkan dengan masa percobaan selama empat bulan. Pada tanggal 18 Agustus Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan setelah jaksa penuntut umum mengajukan banding dengan tuntutan hukuman penjara bagi Syamsul Bahri dan Samsir.¹ Mereka masih berada dalam masa percobaan di akhir tahun kemarin.

Pada 17 Mei, menyusul kritik publik yang disampaikan terkait pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, keduanya merupakan mantan komisioner KPK, dan setidaknya enam anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) lainnya, melaporkan bahwa pihak tidak dikenal telah meretas akun aplikasi perpesanan mereka. Peretasan tersebut terjadi sebelum konferensi pers ICW yang mengkritik pemecatan pegawai KPK, dan selama pelaksanaannya juga menerima gangguan spam dan interupsi digital lainnya.²

HAK MASYARAKAT ADAT

Sepanjang 2021, terdapat pola kekerasan dan intimidasi yang berkelanjutan terhadap masyarakat adat yang berusaha melindungi tanah dan tradisi mereka dari kegiatan komersial.

Pada tanggal 27 Februari, tiga pemimpin masyarakat adat Dayak Modang Long Wai di Provinsi Kalimantan Timur ditangkap saat melakukan protes terhadap perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di tanah adat mereka.

Di bulan April, ketika mencoba untuk menghentikan penanaman pohon eukaliptus di tanah mereka, anggota masyarakat adat Sakai di Provinsi Riau mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas keamanan swasta yang dipekerjakan oleh perusahaan kayu yang telah lama bersengketa terkait hak atas tanah. Anggota masyarakat adat lainnya yang mencoba untuk menghalangi operasi penanaman tersebut didorong, diseret dan dilempar ke tanah oleh petugas keamanan.

Pada kejadian serupa di bulan Mei, anggota masyarakat adat Huta Natumingka di Provinsi Sumatera Utara diserang secara brutal saat sedang melakukan protes terhadap kedatangan ratusan petugas keamanan yang dikirim oleh perusahaan kertas untuk agenda penanaman pohon eukaliptus di tanah yang mereka huni. Puluhan anggota masyarakat menderita luka luka dalam dua insiden tersebut.

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Pihak berwenang terus membatasi hak atas kebebasan berekspresi baik secara daring maupun luring. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) digunakan untuk menindak individu yang mengkritik kebijakan dan aktivitas pemerintah, di setidaknya 91 kasus yang melibatkan 106 korban. Salah satu korbannya adalah Saiful Mahdi, dosen dari Universitas Syiah Kuala Provinsi Aceh, yang menjalani hukuman penjara tiga bulan pada 2 September setelah dinyatakan bersalah atas kritik yang ia sampaikan terkait proses perekrutan di universitas melalui grup WhatsApp pada tahun 2019. Ia dibebaskan pada 12 Oktober setelah mendapatkan amnesti dari Presiden.

Pada 22 September, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menuduh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti “menyebarkan informasi palsu” sehubungan dengan video YouTube yang mereka bawakan di bulan Agustus 2020 membahas laporan dugaan keterlibatan menteri dan anggota militer di industri tambang di Papua. Keduanya kemudian mendapat surat pemanggilan paksa (*subpoena*) pada 26

Agustus dan 2 September dan harus menghadapi penyelidikan pidana di bawah UU ITE.

Di bulan Agustus, polisi menginterogasi beberapa orang yang diduga membuat mural dan poster di beberapa kota yang menampilkan kritik terhadap pemerintah.³ Pada 13 September, setidaknya tujuh mahasiswa Universitas Sebelas Maret di Surakarta, Jawa Tengah, ditangkap setelah membentangkan poster saat kunjungan Presiden Widodo ke kampus mereka. Poster yang dibentangkan berisi himbuan kepada presiden untuk mendukung petani lokal, menyelesaikan kasus korupsi, dan memprioritaskan kesehatan masyarakat selama pandemi.⁴

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL

Pihak berwenang terus melakukan penangkapan dan penahanan secara sepihak kepada aktivis politik di wilayah Papua dan Maluku yang memiliki sejarah gerakan pro-kemerdekaan. Hingga akhir tahun setidaknya 15 tahanan hati nurani Papua dan 11 dari Maluku masih dipenjara. Semuanya didakwa atau dinyatakan bersalah atas pasal makar dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Pada 9 Mei, pihak berwenang di Jayapura, ibukota Papua, menahan aktivis pro-kemerdekaan Papua, Victor Yeimo, yang melakukan aksi protes damai melawan diskriminasi rasial. Ia didakwa melanggar Pasal 106 KUHP tentang makar dan Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan makar. Pengadilan kasusnya ditunda hingga akhir tahun.

Individu yang mendukung hak-hak pekerja ditahan. Pada 22 Februari, Aan Aminah, ketua Federasi Serikat Buruh Militan, ditahan atas tuduhan penyerangan, yang diancam hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan kejadian di bulan Juni 2020 saat Aan Aminah mencoba berbicara dengan pimpinan perusahaan tentang pemutusan kontrak

beberapa pekerja di mana ia membela dirinya saat diusir paksa oleh penjaga keamanan.⁵ Dia dibebaskan pada 6 Juli, tetapi jaksa penuntut umum mengajukan banding atas keputusan tersebut. Hingga akhir tahun belum ada keputusan yang dibuat terkait pengajuan banding tersebut.

Pada 1 Mei, polisi menangkap puluhan mahasiswa yang berpartisipasi dalam aksi damai untuk memperingati Hari Buruh Internasional di ibu kota Jakarta, dan kota Medan. Polisi dilaporkan mengklaim bahwa hanya pekerja manual yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam acara Hari Buruh tersebut.

PENGGUNAAN KEKUATAN BERLEBIHAN

Aksi damai menentang pembaruan dan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang disahkan oleh DPR RI pada 15 Juli, ditanggapi dengan kekuatan yang tidak proporsional termasuk pemukulan, meriam air, dan peluru karet.

Aksi tersebut terjadi di Jakarta dan Papua terhadap perpanjangan status otonomi khusus bagi Papua, dan terhadap ketentuan baru terkait kekuasaan tambahan bagi pemerintah pusat atas urusan Papua dan menghapus hak orang Papua untuk membentuk partai politik. Pada 14 Juli, setidaknya empat mahasiswa terluka di Jayapura setelah bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi diduga memukul pengunjuk rasa menggunakan tinju, senjata, dan tongkat polisi.

Pada 15 Juli, polisi membubarkan pengunjuk rasa di depan gedung DPR di Jakarta. Setidaknya 50 orang ditangkap. Seorang pengunjuk rasa menggambarkan dipukuli, ditinju, diinjak dan dilecehkan secara rasial oleh anggota pasukan keamanan sebelum ditarik ke dalam truk dan dibawa ke markas polisi Jakarta. Pada 16 Agustus, selama protes lain di Jayapura, pasukan keamanan menggunakan meriam air, tongkat karet, dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa.

PEMBUNUHAN DILUAR HUKUM

Ada 11 laporan insiden dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan yang melibatkan 15 korban sepanjang tahun. Semua terjadi di Papua. Lima insiden melibatkan anggota militer Indonesia, dua insiden melibatkan anggota polisi, dan empat insiden melibatkan anggota militer dan polisi. Pihak berwenang mengklaim bahwa mereka telah memulai penyelidikan terhadap empat dari 11 insiden, tetapi tidak ada yang diadili sehubungan dengan pembunuhan tersebut pada akhir tahun 2021.

Pada tanggal 4 Juni, Denis Tabuni dan Eliur Kogoya ditembak oleh seorang anggota militer di sebuah pasar di kota Wamena di Kabupaten Jayawijaya. Denis Tabuni meninggal dan Eliur Kogoya menderita luka tembak di kakinya. Bukannya penyelidikan, “perjanjian damai” ditandatangani antara terduga pelaku dan keluarga Eliur Kogoya.⁶ Pada 16 Agustus, polisi menembak mati Ferianus Asso yang ikut dalam aksi protes di Kabupaten Yahukimo, Papua, menuntut pembebasan aktivis pro-kemerdekaan Papua Victor Yeimo.

HAK PEKERJA

Pencairan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan atas pekerjaannya selama pandemi Covid-19 tertunda akibat inkonsistensi data dan hambatan birokrasi. Sistem insentif telah diperkenalkan pada bulan Maret, akan tetapi pada bulan Juli setidaknya 21.424 petugas kesehatan di 21 provinsi pernah mengalami penundaan atau bahkan pemotongan pembayaran yang semestinya hak mereka. Menurut Laporan Covid-19, sebuah platform pelaporan independen berbasis warga, banyak petugas kesehatan harus datang sendiri ke Kementerian Kesehatan di Jakarta untuk memastikan bahwa data mereka dicatat secara akurat; ini tidak selalu memungkinkan, terutama bagi mereka yang bekerja di daerah yang lebih terpencil.⁷

Seorang mantan relawan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Jakarta

menjadi sasaran intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan setelah merencanakan konferensi pers yang juga terkait keterlambatan pembayaran insentif. Dia mengatakan bahwa dia diinterogasi selama kurang lebih lima jam oleh pasukan keamanan pada 7 Mei di sebuah ruang komite etik rumah sakit tersebut.

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN

Umat Ahmadiyah terus menghadapi diskriminasi dan hak anggotanya untuk menjalankan kegiatan keagamaan di beberapa provinsi ditolak. Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah daerah mengeluarkan “Surat Kesepakatan Bersama” pada 29 April yang melarang komunitas Ahmadiyah setempat menjalankan agama mereka. Pada 13 Agustus, masjid Ahmadiyah ditutup menyusul tekanan dari sebuah kelompok Islam. Bulan berikutnya, sekelompok penyerang tak dikenal menyerang masjid dan membakar gedung yang berdekatan. Pihak berwenang yang hadir tidak mengambil tindakan untuk mencegah serangan tersebut.⁸

Pada tanggal 6 Mei, petugas polisi menghentikan pekerjaan pembangunan masjid Ahmadiyah di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dan menutup lokasi tersebut. Aksi tersebut kabarnya dilakukan atas perintah Bupati Garut menyusul protes dari warga sekitar.⁹ Perwakilan masyarakat Ahmadiyah diduga juga tidak diikutsertakan dalam diskusi antara pemimpin lokal dan warga sebelum pengerjaan masjid dihentikan. Permintaan mereka untuk membahas masalah ini dengan polisi juga dikabarkan ditolak.

¹ [Indonesia: Further information: Environmental Human Rights Defenders Free: Syamsul Bahri and Samsir \(ASA 21/4871/2021\)](#), 12 October

² [“Indonesia: Hacking the accounts of anti-corruption activists is a form of stifling freedom of expression”](#), 18 May (Indonesian only)

³ [“Indonesia: Freedom of expression: 404 not found”](#), 20 August (Indonesian only)

⁴ [“Indonesia: Excessive, police action arrests poster bearers”](#), 14 September (Indonesian only)

⁵ [“Indonesia: Bandung - Free the head of Sebumi Federation Aan Aminah”](#), 25 February (Indonesian only)

⁶ [“Indonesia: Unlawful killings cannot be solved only by peace agreement”](#), 25 June (Indonesian only)

⁷ [“Indonesia: Ensure health workers are paid on time and in full as Covid crisis continues”](#), 6 August

⁸ [“Indonesia: The state must protect Ahmadiyya citizens in Sintang”](#), 3 September (Indonesian only)

⁹ [“Indonesia: Repeal joint ministerial decree and protect Ahmadiyya’s rights”](#), 7 May (Indonesian only)